

Belanja Modal Akan Dikejar

BPK Akan Audit Serapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan belanja modal pada sisa tahun anggaran yang tinggal kurang dari empat bulan diupayakan ada peningkatan berarti. Guna memastikannya, desk pengawasan yang selama ini berada di Kementerian Keuangan akan ditarik ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Harus saya sampaikan, belanja modal di jajaran kementerian dan lembaga tertentu masih jauh dari harapan kita. Kalau tidak segera diperbaiki dalam waktu yang tinggal empat bulan, kita semua ikut bertanggung jawab atas tidak tercapainya target pertumbuhan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Selasa (6/9). Sidang juga diikuti Wakil Presiden Boediono serta Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan segera membentuk desk khusus pemantauan penyerapan belanja modal.

Awalnya, desk itu ada di Kementerian Keuangan lalu nanti akan ditarik di Kementerian Koordinator Perekonomian. Wapres juga sudah setuju.

Menurut Hatta, selama kurang dari empat bulan waktu yang tersisa ini, dia akan mengamati perkembangan penyerapan belanja modal harian. Belanja modal menjadi fokus pengawasan karena belanja nonmodal le-

bih mudah penyerapannya.

Persoalan-persoalan yang akan muncul diperkirakan berkaitan dengan masalah pembebasan lahan, perizinan, dan tender.

"Proses tender sedang berjalan. Kami tidak ingin ada tender yang berbelit-belit sehingga proyek menjadi terkatung-katung. Oleh sebab itu, pelaku-pelaku usaha harus benar-benar yang kredibel dan punya kapasitas. Jangan pengusaha jadi-jadian," kata Hatta.

Sejauh ini, menurut Hatta, serapan belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 baru sekitar 30 persen. Serapan setiap lembaga atau instansi bervariasi, paling sedikit ada yang 5 persen.

"Presiden meminta agar dilakukan evaluasi dan pemantauan ketat setiap saat. Menteri diminta langsung turun, mengecek apa masalahnya dan bagaimana solusinya mempercepat serapan tersebut," kata Hatta.

Menurut Hatta, serapan anggaran belanja modal di semua kementerian/lembaga rata-rata kurang dari 30 persen. Serapan itu hampir sama dengan serapan tahun 2010, tetapi tidak lebih

tinggi dari yang ditargetkan pemerintah.

Kendala pokok yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran itu, antara lain, persoalan lahan dan infrastruktur proyek yang tidak jarang baru terselesaikan menjelang akhir tahun anggaran. Di sisi lain, tender terkadang membutuhkan waktu yang lama, apalagi jika ada komplain dari rekanan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Terkait persoalan ini, pemerintah mendorong agar pelaksanaan tender tidak perlu dilakukan setelah anggaran untuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) turun pada bulan Januari. Tender bisa dilakukan pada bulan Desember, sesaat setelah DPR menyetujui anggaran.

Langkah membentuk desk pemantauan di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian diharapkan juga mempercepat penyerapan anggaran. Mekanisme kerjanya, setiap sekretaris jenderal atau sekretaris menteri diwajibkan melaporkan progres pelaksanaan proyek.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Hadi Poernomo menyatakan, pihaknya akan melakukan audit kinerja berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran belanja tersebut.

"Kami akan melakukan audit kinerja. Mengapa anggaran tidak terserap. Lalu apakah ada proyek-proyek yang gagal. Apa manfaatnya proyek itu. Jadi kita tidak akan ke keuangan, tapi kinerja," katanya. (LAS/WHY/ATO)